# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. [1] Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berasas pancasila. Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu.[2]Indonesia adalah salah satu negara yang menganut faham demokrasi. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

---

[1]Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999), 8.
[2]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), 461.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[3] Dalam pelaksanannya, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Didalam proses pelaksanaannya, pemilihan umum (pemilu) masih di suguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partainya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilihan umum (pemilu) yang melakukan politik uang tersebut.

Pemilihan umum (pemilu) berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).[4]Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5]

---

[3]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

[4]Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-2, 60-61.

[5] Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Ayat 5 Tentang Partai Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pemilihan Presiden (Pilpres) pun dimasukan ke dalam agenda pemilihan umum. Pemilihan Presiden (Pilpres) sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian dari agenda pemilihan umum. Ditengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali.

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.[6]Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah

[6] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan. Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Pemilu).

Tepat pada tanggal 9 Juli 2014 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019 yang serentak diikuti oleh seluruh Kota/Kabupaten dan seluruh Provinsi se-Indonesia, termasuk juga Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan tersebut bertujuan untuk Presiden Indonesia yang baru yang akan menjabat pada periode 2014-2019 untuk menggantikan Presiden terpilih sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menjabat selama 2 (dua) periode. Pemilihan Presiden Indonesia Periode 2014-2019 kali ini diikuti oleh dua calon Presiden dan calon wakil Presiden. Dua kandidat itu adalah Prabowo Subianto-Hatta Radjasa sebagai kandidat dengan nomor urut satu dan kandidat dengan nomor urut 2 (dua) adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kedua calon Presiden yang telah diusung oleh masing-masing partai pendukungnya tentu memiliki basis massa pendukung yang tidak sedikit dan terdapat persaingan elektabilitas sehingga masing-masing calon berusaha untuk mendapatkan suara dengan melakukan berbagai macam cara sekalipun, termasuk pelanggaran dalam Pemilu.

Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan, seperti *Money Politic*. Pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat akan tereliminasi pada tataran praksis.[7] Menurut kacamata Pengamat Politik, pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berada dibawah bayang-bayang ancaman politik uang. Kekhawatiran itu muncul melihat tren penggunaan politik uang memerlukan kapasitas finansial yang cukup besar karena menjangkau pemilih dengan ruang lingkup luas berskala Indonesia. Oleh karena itu, politik uang di pemilihan Presiden (Pilpres) hanya bisa dilakukan oleh kekuatan politik berdana besar yang disokong oleh pendana besar.[8] Sehingga dalam proses pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tak dapat dilepaskan dari berbagi fenomena politik yang muncul dan kerap kali terjadi di masyarakat. Salah satu fenomena politik yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan saat ini adalah maraknya praktik *Money Politic* di Indonesia.

Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak kharisma pesona seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.[9] *Money Politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.[10] KPU (Komisi

---

[7]Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*,Cet.Ke-1 (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 68.

[8] Redaksi Detik News, "Waspadai *Money Politics* di Pilpres 2014, Ini Modus-Modusnya", http://news.detik.com/berita/2627091/ (27 Oktober 2015).

[9]Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 95.

[10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Umum) menganggap politik uang bukan lagi sekedar penyimpangan. Politik uang adalah kejahatan.[11]

Dalam kompetisi politik yang ketat, uang berperan hanya sebatas instrumen. Peran pentingnya adalah bagaimana uang digunakan orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik. Jadi, politik uang adalah pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).

Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik, seperti: para kandidat telah membagi-bagikan uang kepda pemilih, memberikan barang serta menyuap para pejabat penyelenggara pemilihan umum (pemilu), hal tersebut bermula sejak demokratisasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an sehingga istilah *money politic* bisa dikatakan hal yang tidak asing di khalayak umum ataupun kalangan masyarakat khususnya di Indonesia.[12] Dan saat ini, orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih saat pemilihan umum (pemilu). Kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dan ekonomi lemah, tidak sedikit para

---

[11] Rappler.com, "Wawancara Ketua KPU Pilkada Serentak Politik Uang", http://www.rappler.com/indonesia/115531-wawancara-ketua-kpu-pilkada-serentak-politik-uang (13 Maret 2016).

[12]Edward Aspinall, *Pilitik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014'* (Yogyakarta: POLGOV, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon kandidat dalam kampanyenya memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. *Money Politic* seharusnya tidak di jadikan sarana dalam menyukseskan pemilihan umum. Seharusnya para calon kandidat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya, tidak harus memberikan seikat uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat. Melalui *Money Politic* kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan "uang". Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan.

Pada pemilihan umum yang bebas rahasia, "*para calon pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan".* Pemilih akan melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan beragam cara. Beberapa pemilih mungkin berpikir bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi. Beberapa lainnya menganggap hal itu sebagai pemberian yang tidak terikat, sedangkan yang lainnya justru merasa tersinggung.[13]

Hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang persepsi masyarakat terhadap pemilu pada 2013, salah satunya mengenai politik uang, menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Hasil survei KPK menunjukkan 71,72 persen publik menganggap

[13]Edward Aspinall, *Pilitik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014'* (Yogyakarta: POLGOV, 2015), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik uang itu lazim.[14] Temuan yang hampir serupa dilaporkan oleh Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei Indikator yang dilakukan September-Oktober 2013. Hasil survei ini dilaporkan bahwa hasil temuan survei di 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden survey terhadap money politics adalah sebanyak 41,5% dari responden 39 dapil menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar, sedangkan 57,9% mengganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau menolak praktik politik uang. Jadi, sebanyak 41,5% dari responden survey nasional Indikator cenderung lebih toleran terhadap praktik politik uang.[15]

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional, Umar S.Bakry, seperti dikutip dari Antara, sebanyak 69,1 persen responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dalam Pemilu 2014, dengan alasan berbeda-beda. Padahal pada Pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol. Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam Pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara. Memang, sebanyak 41,5 persen responden menyatakan, meskipun bersedia menerima uang, tetapi tidak akan memengaruhi pilihannya. Dengan sikap seperti

---

[14] Burhanuddin Muhtadi, Rillis Hasil Survey Indikator, http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/19/n2otrq-survei-kpk-mayoritas-masyarakat-anggap-politik-uang-hal-lumrah, (01 November 2015).

[15] http://www.indikator.co.id/news/details/1/41/Laporan-Konpers-Rilis-Survei-Sikap-dan-Perilaku-Pemilih-terhadap-Money-Politics, (01 November 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, sama saja mereka sudah membuka pintu lebar-lebar bagi berkembangnya politik uang. Sedangkan Praktik politik uang terjadi dengan pola yang beragam dalam Pilkades, Pilkada, Pemilu legislatif, dan Pemilu Presiden.[16]

Hasil Pemantauan Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa modus operandi politik uang dalam Pemilu berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam. Praktiknya: (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara yang sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang. Kondisi ini menurut laporan pemantauan TII dan ICW, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya.[17]

Adanya praktik 'money politic' atau politik uang yang dilakukan caleg untuk mendulang suara pada tiap pemilu banyak terjadi di Indonesia. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang ditemui melakukan pelanggaran tersebut yaitu Sidoarjo. Menurut laporan Panwas Sidoarjo, ditemukan aksi praktek politik uang dalam pemilu legislatif yang dilakukan oleh partai politik, para kandidat maupun tim sukses masing-masing kandidat. Tindakan yang menodai pesta demokrasi memilih wakil rakyat ini telah diusut Panwas daerah setempat. Dalam pengawasan yang dilakukan PPL (Petugas Pemilu Lapangan) telah ditemukan tiga kasus dugaan kuat *money politic*, diantara berbagai Kecamatan di Kabupaten

---

[16] http://jabar.tribunnews.com/2014/04/14/panwaslu-terima-5-pengaduan-money-politics (01 November 2015).

[17] Ahsan Jamet Hamidi et al., Pemilu Tidak Bebas Politik Uang, (Jakarta: Transparancy International Indonesia, 2008), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo bahwa Kecamatan Candi merupakan salah satu yang melakukan dugaan aksi kuat terjadinya *money politic*. Terbukti tiga kasus itu, di antaranya dilakukan Isa Hasanuddin, caleg PKB untuk DPRD Sidoarjo, dari dapil Sidoarjo-Candi, bahwasanya ditemukan telah membagi-bagikan uang senilai Rp 15 rb tepatnya di Desa Sumokali, Candi-Sidoarjo. Dua kasus lainnya melibatkan Emir Firdaus, caleg nomor 2 dari PAN untuk DPRD Sidoarjo dari dapil Sidoarjo-Candi, bahwasanya ditemukan telah membagi-bagikan uang senilai Rp 10 rb hingga Rp 20 rb tepatnya di Desa Tenggulunan, Candi-Sidoarjo.[18]

Dalam hal ini, *Money Politic* bukan lagi menjadi rahasia umum, karena itu sangat menentukan tinggi rendahnya angka prosentase pemilih pada saat pemilihan umum (pemilu). Berbicara tentang *money* politic, dimana yang sudah disinggung diatas bahwasanya *money politic* sudah tidak tabuh untuk diperbincangkan di khalayak umum ataupun kalangan masyarakat khususnya di Indonesia yang tentunya juga berkaitan erat dengan pemilih pemula selaku salah satu klasifikasi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2014. Hal yang dikhawatirkan adalah dimana mereka (pemilih pemula) tidak ikut dalam berpartisipasi mensukseskan pemilihan umum (pemilu). Mereka adalah penerus bangsa, untuk itu perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum (pemilu) agar mereka lebih rasional ataupun kritis dalam memberikan hak suara saat pemilihan umum (pemilu). Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, dimana mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi

[18] Panwaslu Sidoarjo, "Wawancara Ketua Panwaslu Sidoarjo Qomarud Zaman Usut Serangan Fajar Pada Pemilu Legislatif 2009". http://panwasidoarjo.blogspot.co.id/2009_04_01_archive.html (01 November 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia 5 (lima) tahun ke depan.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.[19] Jadi, pemilih pemula adalah kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula juga cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Untuk itu, penting sekali mendapatkan pendidikan politik yang secara spesifik ditujukan kepada pemilih pemula. Dengan pemahaman mengenai pemilihan umum (pemilu) memungkinkan pemilih pemula menjadi pemilih cerdas yang sadar dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas.

Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik di Indonesia menimbulkan sikap acuh dalam masyarakat. Bagi mereka, tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Bagi mereka yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilihan umum (pemilu) terutama bagi pemilih pemula.

[19]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 22 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Candi merupakan sebuah lokasi yang berada di tengah kota Kabupaten Sidoarjo. Letak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo memiliki letak geografis yang sangat strategis. Ditandai adanya beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang. Lokasi penelitian ini juga dekat dengan gedung pemerintahan Sidoarjo, Alun-alun Sidoarjo, dan kawasan industri Sidoarjo. Dalam penelitian ini, perilaku memilih bagi pemilih pemula sangatlah penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam terutama lokasi yang dipilih oleh peneliti termasuk area perkotaan yang padat penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dikarenakan lokasi sudah termasuk area perkotaan yang *notaben* penduduknya termasuk type penduduk yang *mindset* nya kekinian, wawasannya terbuka, serta pandangan hidup yang lebih rasional. Sehingga pemilih pemula atau kalangan muda di Kecamatan Candi dianggap lebih tanggap, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilu tanpa adanya tendensi dari pihak lain.

Selain itu, melihat dari hasil rekapitulasi suara yang menunjukkan dari 98.078 jumlah daftar pemilih tetap (DPT), sebanyak 73.584 suara (75,03%). Berarti tingkat partisipasi politik di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi. Apa yang menyebabkan tingkat partisipasi politik di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi? yang menyebabkan tingkat partisipasi politik di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi bisa dari beberapa faktor, salah satunya yaitu *money politic. Money politic* memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan candi kabupaten sidoarjo, khususnya pemilih pemula. Karena pemilih pemula secara psikologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kejiwaan yang masih labil sehingga mereka pada umumnya mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Dalam hal ini, banyak kandidat Capres dan Cawapres dalam kampanyenya memberikan imbalan kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan.

Lebih lanjut, terdapat beberapa alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut kacamata Pengamat Politik, pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berada dibawah bayang-bayang ancaman politik uang. Kekhawatiran itu muncul melihat tren penggunaan politik uang memerlukan kapasitas finansial yang cukup besar karena menjangkau pemilih dengan ruang lingkup luas berskala Indonesia. Oleh karena itu, politik uang di pemilihan Presiden (Pilpres) hanya bisa dilakukan oleh kekuatan politik berdana besar yang disokong oleh pendana besar.[20] Di sisi lain, pemilih pemula sendiri memiliki karakteristik yang masih labil, apatis, pengetahuan politik kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Sehingga para calon kandidat mempunyai peluang yang cukup besar untuk menarik simpati pemilih pemula.
2. Bahwasanya marak terjadinya *money politic* telah banyak mempengaruhi masyarakat yang acuh dengan pemilu sehingga mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Mereka tidak akan

[20] Redaksi Detik News, "Waspadai *Money Politics* di Pilpres 2014, Ini Modus-Modusnya", http://news.detik.com/berita/2627091/ (27 Oktober 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpikir jauh ke depan bahwa pemberian itu sebenarnya akan merugikan diri mereka sendiri. Semua itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Oleh karena itu sangat diperlukan pembelajaran tentang pengetahuan politik khususnya pengetahuan *money politic* dalam pemilu terhadap pemilih ataupun pemilih pemula untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga diharapkan para pemilih atapun pemilih pemula bisa lebih rasional maupun kritis untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu. Karena semakin rasional maupun kritis generasi muda kita, akan membuat semakin sejahtera dalam suatu negara.

3. Adanya praktik 'money politic' atau politik uang yang dilakukan caleg untuk mendulang suara pada tiap pemilu banyak terjadi di Indonesia. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang ditemui melakukan pelanggaran tersebut yaitu Sidoarjo. Menurut laporan Panwas Sidoarjo, ditemukan aksi praktek politik uang dalam pemilu legislatif yang dilakukan oleh partai politik, para kandidat maupun tim sukses masing-masing kandidat. Tindakan yang menodai pesta demokrasi memilih wakil rakyat ini telah diusut Panwas daerah setempat. Dalam pengawasan yang dilakukan PPL (Petugas Pemilu Lapangan) telah ditemukan tiga kasus dugaan kuat *money politic*, diantara berbagai Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo bahwa Kecamatan Candi merupakan salah satu yang melakukan dugaan aksi kuat terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*money politic*. Terbukti tiga kasus itu, di antaranya dilakukan Isa Hasanuddin, caleg PKB untuk DPRD Sidoarjo, dari dapil Sidoarjo-Candi, bahwasanya ditemukan telah membagi-bagikan uang senilai Rp 15 rb tepatnya di Desa Sumokali, Candi-Sidoarjo. Dua kasus lainnya melibatkan Emir Firdaus, caleg nomor 2 dari PAN untuk DPRD Sidoarjo dari dapil Sidoarjo-Candi, bahwasanya ditemukan telah membagi-bagikan uang senilai Rp 10 rb hingga Rp 20 rb tepatnya di Desa Tenggulunan, Candi-Sidoarjo.[21]

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh *Money Politic* Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014".

## B. Rumusan Masalah

Pada setiap pelaksanaan penelitian pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan yang perlu dicari jawabannya. Berawal dari latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini, peneliti menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk *Money Politic* yang ada pada masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014?

[21] Panwaslu Sidoarjo, "Wawancara Ketua Panwaslu Sidoarjo Qomarud Zaman Usut Serangan Fajar Pada Pemilu Legislatif 2009". http://panwasidoarjo.blogspot.co.id/2009_04_01_archive.html (01 November 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014?
3. Seberapa besar pengaruh *Money Politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014?

## C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti perlu untuk memberikan batasan penelitian terkait pengaruh *Money Politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014, sebagai berikut:

1. Pemahaman yang dibahas disini hanya tentang praktik *Money Politic* yang mempengaruhi perilaku memilih pada pemilih pemula, khususnya pada pemilihan Presiden yang ada di Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
2. Letak atau lokasi wilayah pada penelitian ini adalah Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo.
3. Objek penelitian adalah Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo yang tergolong sebagai pemilih pemula dan terdaftar atau masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta ikut mencoblos atau menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempuyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi penelitian ini. Tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi bentuk *Money Politic* yang ada dalam Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014.
2. Mengidentifikasi tipologi perilaku memilih pada Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014.
3. Menganalisa seberapa besar pengaruh *Money Politic* terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan Presiden 2014.

## E. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat peneliti paparkan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Menjadi salah satu sumber atau bahan rujukan dalam wacana politik bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Khususnya bagi mahasiswa Program Studi Filsafat Politik Islam dapat menambah khazanah keilmuan yang ilmiah dalam kajian *Money Politic* yaitu mengenai seberapa besar pengaruh *Money Politic* terhadap Perilaku Pemilih Pemula dalam pemilihan Presiden 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis
   a. Menambah wawasan dan meningkatkan kreativitas diri dalam lingkungan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
   b. Memberikan gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya pengaruh perilaku pemilih pemula di dunia politik, khususnya dalam pemilihan Presiden 2014.
   c. Bagi pengamat politik sebagai bentuk informasi dan bahan analisa mengenai pengaruh Perilaku Pemilih Pemula di dunia politik khususnya dalam pemilihan Presiden 2014.

## F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi keilmuan dalam skripsi ini serta berapa banyak peneliti yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena sejak penelusuran awal sampai saat ini, peneliti belum menemukan penelitian secara spesifik tentang "Pengaruh *Money Politic* Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014". Banyak penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Abdillah yang berjudul "*Money Politic Dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penelitian tersebut, menyimpulkan Praktik *money politic* serta status uang atau jasa yang diberikan (berupa perbaikan sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana publik lainnya, termasuk juga penerangan listrik di jalan-jalan desa) kepada tokoh atau masyarakat pada umumnya yang dilakukan oleh seorang calon kepala desa di Desa Tegal Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. *Money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan.
b. *Money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa dibolehkan hanya bagi pihak pemberi, apabila hal ini dilakukan oleh seorang calon yang memang memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjabat sebagai kepala desa dan status uang bagi pemberi dihukumi hadiah. Sedangkan bagi pihak penerima tetap tidak diperbolehkan dan uang yang diterima dihukumi uang suap yang diharamkan.[22]

2. Skripsi yang ditulis oleh Ananta Bagus Perdana yang berjudul "Penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politics* yang dilakukan para calon legislatif pada pemilu tahun 2014 (studi kasus di wilayah hukum surakarta)".

Dari penelitian tersebut, Setiap Pemilu, khususnya pada tahun 2014 banyak terjadi *money politics.* Menurut undang-undang yang berlaku, para

[22]Hasan Abdillah, "*Money Politic Dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku *money politics* memperoleh hukuman. Pada kenyataannya para pelaku *money politics* jarang yang terkena hukuman. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) Bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014: (a) secara langsung praktik *money politics* dapat berupa uang atau barang. Pada kenyataannya *money politics* dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan oleh para caleg. *Money politics* secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" (b) *Money politics* secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako, dan dana bantuan secara individual atau kelompok. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics*, Adanya keinginan sesorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak *money politics* kurang. (3) Realita penanganan kasus praktik *money politics* dalam Pemilu legislatif 2014 di Surakarta tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. (4) Kendalakendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politics* Pemilu legislatif 2014 di Surakarta dari undang-undang, panwaslu kesulitan menemukan bukti, dan kurang partisipasi masyarakat.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dedi Irawan yang berjudul "*Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan*".

Dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa politik uang (*Money Politics*) dalam pemilu legislatif tahun 2014 banyak terjadi pelanggaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi/pola yang digunakan dalam praktek politik uang (*Money Politics*), strategi/pola yang digunakan ialah serangan fajar dan mobilisasi massa, strategi ini yang banyak digunakan untuk mempengaruhi pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda.[23]

Dalam berbagai penelitian terdahulu skripsi dan jurnal belum dimunculkan adanya pengaruh money politic terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014. Di dalam penelitian pertama, kedua, bahkan ketiga memiliki persamaan yang akan dilakukan penulis yaitu persamaan pembahasaan pada *money politic* tiap pelaksanaan pemilu, hanya saja yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada pelaksanaan pemilihan presiden yang secara sebelumnya pernah diteliti dikarenakan kebanyakan peneliti sebelumnya lebih terfocus pada pemilihan pilkades, pilkada dan pileg saja meskipun dengan obyek yang berbeda-beda. Sedangkan perbedaan dari peneliti sebelumnya adalah penulis akan meneliti dengan obyek sasaran pemilih pemula yang diyakini bahwasanya pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu).

## G. Variabel dan Indikator Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) variable, yaitu Variable Bebas (Variable X) dan Variable Terikat (Variable Y).[24] Dalam penelitian ini Variabel X membahas tentang "Pengaruh *Money Politic*", sedangkan Variabel Y membahas

[23]Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan", Jurnal tentang Ilmu Pemerintah, Vol. 3, Nomor 4, (Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2015).
[24] Suharsini Arikuntoo, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang "Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014". Adapun indikator dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Variabel Penelitian**

| Variabel X<br>(Pengaruh *Money Politic*) | Variabel Y<br>(Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014) |
|---|---|
| 1. Pemahaman terhadap *money politic*<br>a. Pengetahuan *money politic*<br>b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politic*<br><br>2. Bentuk-Bentuk *Money Politic*<br>a. Berbentuk uang (*Cash Money*) dan barang. Uang salah satu modal politik dan alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik untuk mendapatkan suara terbanyak.<br>b. Berbentuk fasilitas umum. Berbentuk gerakan tebar pesona dan tarik pesona dalam mencari suara, dengan memberi semen dan pasir untuk fasilitas umum yang memiliki persoalan dalam hal pembangunan. Politik pencitraan dan tebar pesona ini menggunakan alat pertukangan dan material bangunan sebagai instrument medianya dalam menarik simpati dari masyarakat.<br>3. Strategi *Money Politic*<br>a. Serangan fajar. Yaitu, membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Bentuknya berupa: membelokkan pendukung rival politik untuk memilih dirinya, dengan membagikan uang kepada masyarakat tepat pada hari pemungutan suara. | 1. Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Usia, Pekerjaan, dan Agama)<br><br>2. Jenis-Jenis Perilaku Pemilih:<br>a. Rasional (memiliki orientasi tinggi pada "*policy problem solving*" dan berorientasi rendah untuk faktor ideology)<br>b. Kritis (bergantung pada kinerja partai atau kandidat)<br>c. Tradisional (kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul paham, dan agama)<br>d. *Skeptis* (Kurang mempedulikan program kerja)<br><br>3. Teori Pilihan Rasional (Pilihan, keyakinan, dan tindakan memiliki hubungan satu sama lain) |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| b. Mobilisasi Massa. Yaitu, kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil Pemilu. | |

Dua variabel yang sebagaimana diklasifikasikan seperti diatas memiliki asumsi bahwa, ada pengaruh *money politic* terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat kecamatan candi di kabupaten sidoarjo dalam pemilihan presiden 2014. Asumsi tersebut berawal dari *money politic* yang dilakukan untuk memenangkan calon kandidat untuk bersaing dalam mendapatkan kekuasan saat pemilu. Dimana diakui bahwa *money politic* telah menjadi "budaya" dalam dunia perpolitikan, khususnya di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya kurang rasa percaya diri dalam sebuah pemilu atau pemilihan lainnnya yang bersifat kedaerahan bagi salah satu calon, ataupun bisa juga terjadi karena sebuah jalan pintas dalam mengambil simpati para pemilih. Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dan ekonomi lemah, tidak sedikit para calon kandidat dalam kampanyenya memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *money politic*, yaitu: kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, serta kebudayaan. *Money politic* yang dilakukan berbentuk, seperti: berbentuk uang dan barang, serta berbentuk fasilitas umum. Sedangkan strategi yang digunakan adalah Serangan fajar. Yaitu, membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Bentuknya berupa: membelokkan pendukung rival politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memilih dirinya, dengan membagikan uang kepada masyarakat tepat pada hari pemungutan suara. Mobilisasi Massa. Yaitu, kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil Pemilu. Dan pemilih pemula adalah pemilih yang sama sekali tidak pernah atau mempunyai pengalaman dalam mencoblos atau memilih dalam pemilihan umum, maka disini *money politic* dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan sikap rasioanl ataupun kritis tidaknya pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya.

## H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Pengaruh *Money Politic* Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014". Untuk memudahkan dalam menjelaskan maksud dari penelitian ini, sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut:

**Money Politic :***Money Politic* yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.[25] Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Money Politic* ialah suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu ataupun sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

**Pemilih Pemula :** Pemilih pemula adalah golongan penduduk usia 17 tahun hingga 21 tahun. Namun ada definisi yang lain lagi yaitu mereka

[25]Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Atau pemilih pemula adalah mereka yang baru akan memulai pengalaman pertama kali didalam mencoblos pada pemilu 2014.[26] Sehingga, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pemilih pemula adalah Aktivitas warga negara berkaitan dengan penggunaan hak politiknya dalam pemilu khususnya pemilih yang memiliki usia dari 17 hingga 21 tahun yang berdomisili Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014.

**Perilaku Memilih:** Perilaku memilih adalah akivitas pemberian suara oleh individu yang bekaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) didalam suatu pemilihan umum. Bila *voters* atau pemilih memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka, pemilih akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.[27] Adapun tipologi perilaku memilih, diantaranya: pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis.[28]

**Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo:** Masyarakat yang dimaksud adalah pemilih pemula dalam hal ini memiliki KTP serta berdomisili Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk mengikuti Pemilu secara langsung.

---

[26] Wikipedia, "Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014 (12 Oktober 2015).
[27] Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilu dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 170.
[28] Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Pemilihan Presiden 2014:** Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019.[29] Pemilihan Presiden yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali guna menentukan Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengaruh *Money Politic* Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014" adalah pengaruh *money politic* baik berbentuk uang dan barang, serta berbentuk fasilitas umum sedangkan strategi yang digunakan adalah serangan fajar dan mobilisasi massa, terhadap pemilih pemula saat menentukan hak pilihnya dalam pemilihan presiden 2014.

[29] Wikipedia, "Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014 (12 Oktober 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id